**ABSTRAK**

Laporan Akhir ini berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK (*OPEN DATA CONTRACT*) DI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOJONEGORO**

**PROVINSI JAWA TIMUR.”** Penulisan difokuskan tentang bagaimana pelaksanaan Sistem Keterbukaan Dokumen Kontrak (*Open Data Contract*) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro atau dalam pelaksanaanya sering juga disebut dengan Sistem Informasi *Monitoring* dan *Open Data Contract* (SIMPEN) serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Sistem tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode magang deskriptif dengan pendekatan induktif, selanjutnya instrument yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh hasil dari analisis dengan metode reduksi, penyajian data lalu penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian magang ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Keterbukaan Dokumen Kontrak (*Open Data Contract*) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro masih kurang optimal dibuktikan dengan masih ditemukannya data yang ter-input dalam *website* terjadi kesalahan teknis maupun error. Hambatan yang dihadapi yaitu sosialisasi yang kurang optimal, kualitas dan kuantitas SDM, kurangnya koordinasi, dan sikap masyarakat sebagai sasaran program masih kurang. Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi hambatan Sistem Keterbukaan Dokumen Kontrak (*Open Data Contract*) yaitu meningkatkan komunikasi dan Sosialisasi, melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana teknis serta operator, dan memberikan motivasi kepada para unsur penyedia barang dan jasa konstruksi dan pemahaman kepada masyarakat.

Penulis menyarankan untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Keterbukaan Dokumen Kontrak (*Open Data Contract*) adalah memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan program, meliputi komunikasi, sumber daya, sikap aparatur, dan struktur birokrasi. Selain itu, perlunya peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dan pelaksana teknis serta operator, serta pemberian pengertian yang mendalam kepada masyarakat mengenai Sistem Keterbukaan Dokumen Kontrak (*Open Data Contract*) yang lebih baik.

**Kata kunci : implementasi, Sistem Keterbukaan, Dokumen Kontrak , Informasi Monitoring**